TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI
2016

PERMENHUB NO. 68 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 815, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Milik Negara, perlu mengatur Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api untuk Pelayanan Kelas Ekonomi.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 124 Tahun 2015; PERMENHUB No. 196 Tahun 2015; PERMENHUB No. 197 Tahun 2015; PERMENHUB No. 48 Tahun 2015; PERMENKEU No. 250 Tahun 2010; PERMENKEU 172 Tahun 2013; PERMENKEU No. 264 Tahun 2014; PERMENKEU No. 231 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi meliputi perencanaan, penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, pembayaran dan verifikasi, pelaporan, pemeriksaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juni 2016 dan ditetapkan tanggal 27 Mei 2016.
  - Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.